

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
KESETARAAN GENDER MENGENAI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Oleh:

FABIAN ZULFAN NURAHMAN
202010115186



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
KESETARAAN GENDER MENGENAI
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA
BEKASI.

Nama Mahasiswa : FABIAN ZULFAN NURAHMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115186

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Februari 2024

MENYETUJUI

BIKSA MAHWASTU DASI

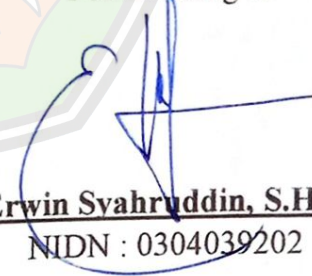
JAKARTA RAYA

Pembimbing I



Rahmat Saputra, S.H., M.H
NIDN: 0304058306

Pembimbing II



Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H
NIDN : 0304039202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KESETARAAN GENDER
MENGENAI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI KOTA BEKASI.

Nama Mahasiswa : FABIAN ZULFAN NURAHMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115186

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, Februari 2024
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Rahmat Saputra, S.H., M.H**
NIDN. 0304058306

Penguji I : **Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si**
NIDN. 0302057403

Penguji II : **Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H**
NIDN. 03310 18008

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 042403900

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dian Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KESETARAAN GENDER
MENGENAI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI KOTA BEKASI.

Nama Mahasiswa : FABIAN ZULFAN NURAHMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115186

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kesetaraan Gender Mengenai Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bekasi.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Fabian Zulfan Nurahman

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fabian Zulfan Nurahman

NPM : 202010115186

TTL : Jakarta, 18 Januari 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KESETARAAN GENDER MENGENAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA BEKASI.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



Fabian Zulfan Nurahman

ABSTRAK

Fabian Zulfan Nurahman, 202010115186, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kesetaraan Gender Mengenai Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bekasi.

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender telah dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dan menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan peluang. Aturan ini juga bertujuan untuk memastikan partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara bagi semua individu. Dalam hal ini, diperlukan kebijakan strategis untuk mengintegrasikan gender melalui perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Bekasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender didasarkan pada Pasal 3 hingga Pasal 5. Pasal 3 menetapkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bekasi akan menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 4 menjelaskan bahwa Analisis Gender akan dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Gender Pathway dan metode analisis lainnya. Pasal 5 menegaskan bahwa Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi.

Dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi, langkah-langkah telah diambil melalui Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Pasal 3 telah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2018-2023 dengan implementasi Pengarusutamaan Gender dan pencapaian beberapa target yang telah ditetapkan. Selain itu, Pasal 3 juga tercermin dalam Rencana Kerja Akhir Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender terwujud melalui pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Perwal Nomor 86 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Berkelanjutan, Implementasi Peraturan Menteri

ABSTRACT

Fabian Zulfan Nurahman, 202010115186, Implementation of Government Policy on Gender Equality Regarding Sustainable Development in Bekasi City.

Mayor of Bekasi Regulation Number 85 of 2020.99-DPPPA/II/2020 on Gender Mainstreaming has been created with the aim of empowering women, protecting women, improving family quality, and creating equality between men and women in accessing opportunities. This regulation also aims to ensure equal participation, control, and benefits of development for all individuals. In this regard, strategic policies are needed to integrate gender through planning, budgeting, monitoring, and evaluating policies, programs, and development activities in Bekasi City.

Research results show that the legal provisions regarding gender equality and justice in Mayor of Bekasi Regulation Number 85 of 2020.99-DPPPA/II/2020 on Gender Mainstreaming are based on Articles 3 to 5. Article 3 stipulates that the Bekasi City Local Government will formulate gender-perspective policies, programs, and development activities in the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Article 4 explains that Gender Analysis will be conducted using the Gender Pathway Analysis method and other analysis methods. Article 5 emphasizes that the Mayor is responsible for the implementation of Gender Mainstreaming in Bekasi City.

In the context of implementing government policies on gender equality in sustainable development in Bekasi City, steps have been taken through the established Development Plan and Work Plan. Article 3 has been implemented in the Bekasi City Regional Medium-Term Development Plan 2018-2023 with the implementation of Gender Mainstreaming and the achievement of several predetermined targets. Furthermore, Article 3 is also reflected in the Year-End Work Plan 2023 of the Bekasi City Women's Empowerment and Child Protection Agency. The implementation of Article 5 of Mayor of Bekasi Regulation Number 85 of 2020.99-DPPPA/II/2020 on Gender Mainstreaming is realized through the establishment of the Women's Empowerment and Child Protection Agency based on Mayor Regulation Number 86 of 2016, which regulates the position, organizational structure, main tasks and functions, as well as the working system of the Bekasi City Women's Empowerment and Child Protection Agency.

Keywords: Gender Mainstreaming, Sustainable Development, Implementation of Ministerial Regulation

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoritis	7
1.6. Kerangka Konseptual	10
1.7. Kerangka Pemikiran	15
1.8. Penelitian terdahulu	15
1.9. Metode Penelitian	21
1.9.1. Jenis Penelitian	21
1.9.2. Pendekatan Penelitian	21
1.9.3. Sumber Bahan Hukum	22
1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24

BAB II BAB II TENTANG KEBIJAKAN PENERAPAN KESETARAAN GENDER

2.1. Kesetaraan Gender	25
2.2. Kebijakan Pemerintah Pengarusutamaan Gender	29
2.3. Gender Dalam Pembangunan	35

BAB III OBJEK PENELITIAN PENERAPAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KOTA BEKASI

3.1. Diskriminasi Gender di Indonesia	41
3.1.1. Stereotip	41
3.1.2. Subordinasi	42
3.1.3. Marginalisasi	45
3.1.4. Beban Berlebihan	47
3.1.5. Kekerasan	47
3.2. Gambaran Umum Kesetaraan dan Keadilan Gender di Kota Bekasi ..	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISA IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER MENGENAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA BEKASI

4.1. Aturan Hukum Mengenai Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender.....	62
4.2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bekasi.....	72

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	83
5.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah.

Terima Kasih.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
PUG	Pengarusutamaan Gender
KKG	Kesetaraan dan Keadilan Gender
HAM	Hak Asasi Manusia
BPS	Badan Pusat Statistik
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
CEDAW	<i>Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UNDP	United Nations Development Programs
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
HLS	Harapan Lama Sekolah
RPD	Rencana Pembangunan Daerah
RAD	Rencana Aksi Daerah



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KESETARAAN GENDER MENGENAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA BEKASI”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.r. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rahmat Saputra, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.

